

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022**  
**PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target				
					TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>BIDANG IPP</b>																									
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp	200,000,000	100,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000						1	Audit atas laporan keuangan atas proyek yang dibiayai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri	7	Hasil audit tidak dapat ditindaklanjuti	21	74,070,000	Korwas Bid IPP	Laporan	1	3	3	
														2	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim Rumah Sakit	2			32,920,000		Laporan		1	1	
2	Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pembangunan nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1			1							1	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Sektor Kereta	1	Pedoman reviu tidak disusun dengan lengkap untuk memenuhi tujuan	13	8,230,000	Korwas Bid IPP	Laporan			1	
														2	Pengawasan atas Implementasi Reformasi Birokrasi	1			8,230,000		Laporan				
														3	Pengawasan atas Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan A Kab/Kota/Prov A	1			16,460,000		Laporan				
														4	Pengawasan atas Bantuan Operasional Sekolah	5			16,100,000		Laporan				
														5	Pengawasan Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Lingkungan Kemendikbud	4			16,460,000		Laporan				
														6	Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting pada BKKBN	2			16,460,000		Laporan				
														7	Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TNI/Polri	6			30,750,000		Laporan				
														8	Pengawasan atas Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	1			8,230,000		Laporan				
														9	Pengawasan atas Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	1			8,230,000		Laporan				
														10	Pengawasan atas Pembangunan infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Provinsi DIY	1			8,230,000		Laporan				
														11	Pengawasan atas Pembangunan infrastruktur infrastruktur SPAM di	1			8,230,000		Laporan				
														12	Pengawasan atas pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi DIY	1			16,460,000		Laporan				
														13	Pengawasan atas Optimalisasi Program Padat Karya Kementerian PU PR pada	4			24,320,000		Laporan				
														14	Pengawasan atas Stimulus Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi COVID-19 pada	1			8,230,000		Laporan				
														15	Pengawasan Pemanfaatan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	1			4,520,000		Laporan				
														16	Pengawasan atas Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) pada Kemenparekraf/Baparekraf	1			8,230,000		Laporan				
														17	Pengawasan Program PEN Sektor UKM Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM)	2			16,460,000		Laporan				
														18	Pengawasan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan	1			30,000,000		Laporan				
														19	Pengawasan atas P3DN 10 K/L, Pengawasan P3DN Sektor Farmasi dan Alkes/ Sektor Jasa Konstruksi/ Sektor	2			47,920,000		Laporan				





		Jumlah Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/kota	3				3																			
		Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persentase	100	50%	100%								1	Evaluasi Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa pada Pemkab	8	Auditi menolak/membatasi penugasan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan)	1	6,360,000		Laporan	2	2	2	2		
														2	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa pada Pemkab	8	penugasan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan)	1	8,370,000		Laporan	2	2	2	2		
														3	Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Bimtek Aplikasi SISKEUDES)	8	Aplikasi tidak dapat digunakan	1	30,000,000		Laporan	2	2	2	2		
														4	Evaluasi Program Pengembangan Potensi Desa pada Pemda	8	penugasan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan)	1	180,855,000		Laporan				8		
		Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persentase	66.67		66.67								1	Evaluasi atas Tata Kelola Cadangan Pangan pada Pemerintah Daerah	1	Auditi menolak/membatasi penugasan (audit, reviu,	1	30,000,000		Laporan				1		
														2	Evaluasi Implementasi Perizinan Berusaha (OSS) di Daerah pada Pemda	2	Auditi menolak/membatasi penugasan	1	25,000,000		Laporan		2				
														3	Reviu Sisa Bos Tahun 2011 per 31 Desember 2021 pada Pemkab	5	Auditi menolak/membatasi penugasan	1	10,606,000		Laporan	5					
														4	Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan	1	21,000,000		Laporan	2					
													5	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah pada pemda	1	Auditi menolak/membatasi penugasan	1				Laporan				1		
														6	Pengawasan Aset Strategis Pemda	1	Auditi menolak/membatasi penugasan	1	5,000,000		Laporan		1				
														7	Konsultasi Implementasi SIMDA-NG (FMIS)/CACM Pemda	2	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan	1	25,000,000		Laporan	1				1	
														8	Bimtek Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemda	1	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan	1	15,000,000		Laporan	1					
		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	135	25	30	40	40							Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa pada Pemkab	8	menolak/membatasi penugasan (audit, reviu, evaluasi, dan	1	8,810,000		Laporan	2	2	2	2		
														90				26	769,955,000								
BIDANG INVESTIGASI																											
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (juta)	1,5			750	750						1	Audit Penyesuaian Harga	1	Terjadinya kesalahan menentukan jumlah klaim/eskalasi/kerugian	5	19,740,000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan				1		
														2	Audit Klaim	1	Terjadinya kesalahan menentukan jumlah klaim/eskalasi/kerugian	5	19,580,000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan				1		
														3	ATT	1	Terjadinya kesalahan menentukan jumlah klaim/eskalasi/kerugian	5	56,090,000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan				1		
			Nilai Penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (juta)	99,43				99						1	Audit Investigatif	2	Kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) tidak selesai	17	40,504,000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan				1	1
															2	Audit PKN	5	Kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) tidak selesai	17	87,750,000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan	1		2	2	

2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentase Hambatan Pelaksanaan yang Diselesaikan	Persen	85					85					Hambatan Kelancaran Pembangunan	1	Tidak terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang dimediasi dalam menyikapi permasalahan yang ada	5	23,930,000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan					1			
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100					100					Pemberian Keterangan Ahli	8	Ahli gagal meyakinkan majelis hakim di dalam pemberian keterangan ahli	3	12,840,000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan	1	1	3	3				
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	80					80		1			1	Fraud Control Plan (FCP)	1	- FCP Gagal diterapkan - FCP sudah diterapkan tetapi gagal mendeteksi	17	4,260,000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan							
											2			1	Masyarakat Pembelajar Antikorupsi	1		1,530,000										
												3			3	Penyusunan Profil Risiko Fraud	6		16,095,000				3	3				
												4			1	Coaching Clinic	1		6,250,000									
	Jumlah Pemda menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda		1				1						2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2		8,115,000					2					
															30		74	296,684,000										

**BIDANG AKUNTAN NEGARA**

1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1					1					1	Reviu Tata Kelola PSN Bandara YIA dan PSN Kamijoro	2	Kertas kerja untuk kegiatan pengawasan tidak memadai	16	12,220,000	Korwas AN	Laporan					2
														2	Pengawasan atas aspek GRC pada aksi korporasi di lingkungan BUMD dan PSN SAPM	2	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance	19	6,450,000	Korwas AN	Laporan					2
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1					1					1	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN - Quality Assurance GCG PT TWCC	1	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai tepat waktu	17	7,975,000	Korwas AN	Laporan					1
														2	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah pada BUMN - Evaluasi Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah pada BUMN	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance	19	7,460,000	Korwas AN	Laporan			1		
														3	Pengawasan atas Penyaluran Bantuan Sosial Beras - Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Evaluasi Tata Kelola Cadangan Pangan	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance	19	11,320,000	Korwas AN	Laporan			1		
														4	Pengawasan atas tata kelola subsidi pupuk - Evaluasi Subsidi Pupuk	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance	19	7,910,000	Korwas AN	Laporan				1	
														5	Pengawasan Akses Permodalan bagi Masyarakat Miskin - Reviu penyaluran permodalan bagi masyarakat miskin (Bank Himbara dan Lembaga Penyalur)	3	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance	19	24,000,000	Korwas AN	Laporan			3		
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11					11					1	Pengawasan terhadap kualitas tata kelola, manajemen risiko dan satuan pengawasan intern BU Jasa Air - Evaluasi Kinerja BU Jasa Air (PDAM)	1	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai tepat waktu	17	6,038,000	Korwas AN	Laporan					1
														2	Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD - Assessment pada BUMD Aneka Usaha	1	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai	17	11,850,000	Korwas AN	Laporan			1		

																				3	Pengawasan Penempatan Dana pada BPD- Monitoring & Reviu PDP BPD DIY	1	Kertas kerja untuk kegiatan pengawasan tidak	16	8,450,000	Korwas AN	Laporan	1								
																					4	Reviu Tata Kelola SPAM pada BU Jasa Air	1	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai	17	23,050,000	Korwas AN	Laporan						1		
																					5	Pengawasan Kualitas Tata Kelola (GRC) dan kinerja keuangan, operasional BPD	6	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah	14	10,800,000	Korwas AN	Laporan					2	4		
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BULD		1					1											1	Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU Pendidikan dan BLUD Kesehatan - Evaluasi Kinerja BLUD Kesehatan dan Pendidikan	3	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance	19	6,300,000	Korwas AN	Laporan					2	1		
																					2	Pengawasan atas pengajuan dan verifikasi klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan - Audit Klaim RS dan Evaluasi	6	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai	17	124,965,000	Korwas AN	Laporan					3	3		
																					3	Pengawasan atas Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin baik	2	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai	17	22,780,000	Korwas AN	Laporan					2			
																					4	Pengawasan Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin)	2	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai	17	22,780,000	Korwas AN	Laporan					2			
																					5	Pengawasan P3DN Sektor Farmasi dan Alkes - Reviu P3DN RSUP Sardjito	1	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai	17	8,960,000	Korwas AN	Laporan					1			
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes		19					14											1	Pengawasan Peran BUM Desa terhadap Program Pengembangan Potensi Desa dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan BUM Desa - Bimtek SIA BUM	3	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan	7	24,600,000	Korwas AN	Laporan					1	2		
																					2	Pengawasan Peran BUM Desa terhadap Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan, dan Keperantaraan dengan BUMD/N - Evaluasi secara Terbatas (yaitu Monitoring/Obeservasi/FGD Peran	2	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	14	11,200,000	Korwas AN	Laporan						2		
3		Jumlah BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	BUMN		0																															
	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	BLUD		4						4										1	Kualitas Pengendalian Intern pada BUMD, BLU dan BLUD (MRI BLU, MRI BLUD, SPI BLU, SPI atas BUMD Jasa Air dan Aneka Usaha - Bimbingan Teknis	5	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	12	62,467,000	Korwas AN	Laporan					1	1	3	
																					2	Kualitas Pengendalian Intern pada BUMD, BLU dan BLUD (MRI BLU, MRI BLUD, SPI BLU, SPI atas BUMD Jasa Air dan Aneka Usaha - Evaluasi Maturitas	4	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	14	59,883,000	Korwas AN	Laporan					2	2		
													<b>49</b>		<b>343</b>	<b>481,458,000</b>																				
<b>BIDANG P3A</b>																																				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP		1						1										Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP	4	Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) tidak diimplementasikan	11	28,000,000	Korwas P3A	Laporan					1	1	2		
		Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP		11						11											Pembinaan Penerapan JFA pada APIP	3	Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) tidak diimplementasikan	11	21,731,000	Korwas P3A	Laporan					2	1		
		Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP		4			3			1											Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi SISWASKEUDES	4	Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) tidak diimplementasikan	11	10,000,000	Korwas P3A	laporan					1	1	2	
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100		87						87											Pengawasan Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil	4	Terlambat penyusunan laporan keuangan internal	3	80,000,000	Korwas P3A	Laporan					1	1	1	1
		Prosentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen		100						100											Pemantauan Pelaksanaan RTP	2	Kegiatan di luar RKT tidak dianggarkan	7	-	Korwas P3A						1	1		

											17	43	139,731,000								
<b>BAGIAN TATA USAHA</b>																					
Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	90				90				1 Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan;	1 Pemotongan anggaran	3	20,710,000	Sub Koordinator RT	Laporan	1	1	1	1	
											2 Gaji dan Tunjangan;	1 Keterlambatan penerbitan Surat	1	24,569,217,000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan				1	
												3 Penyelenggaraan RB dan ZI;	1 Adanya resistensi pegawai terhadap	7	45,593,000	Kabag Umum	Laporan				1
												4 Penyusunan Bahan Perencanaan, RKT dan Perkin;	1 Kegiatan dukungan tidak selesai tepat waktu	3	31,183,000	Korwas P3A	Laporan				1
												5 Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;	4 Kegiatan dukungan tidak selesai tepat waktu	3	23,520,000	Korwas P3A	Laporan				1
												6 Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	1 Kegiatan dukungan tidak selesai tepat waktu	3	-	Korwas P3A	Laporan				1
	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95				95				1 Penyusunan RKA dan Revisi;	1 Kesalahan pembebanan anggaran	1	41,690,000	Sub Koordinator Keuangan	Dokumen DIPA					1
											2 Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	1 Penggelapan	3	22,940,000	Sub Koordinator Keuangan	Laporan					1
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100				100				1 Penyusunan Pelaporan KLPBU	1 Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan	3	56,719,000	Sub Koordinator Keuangan	Laporan					1
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80				80				1 Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Pemotongan anggaran	3	-	Sub Koordinator Peng. BMN, RT dan Kearsipan	Laporan					1
											2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor;	1 Pemotongan anggaran	3	3,523,440,000	Sub Koordinator Peng. BMN, RT dan Kearsipan	Kegiatan				1	
											3 Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pemotongan anggaran	3	71,266,000	Sub Koordinator Peng. BMN, RT dan Kearsipan	Kegiatan				1	
	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	65				65				1 Penyelenggaraan SPIP dan MR	1 Stakeholder tidak siap	3	54,553,000	Kabag Umum	Laporan					1
											2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;	1 Keterlambatan penerbitan Surat	1	38,956,000	Sub Koordinator Kepegawaian	Laporan		1		1	
3 Penilaian Angka Kredit;											2 Keterlambatan penerbitan Surat	1	29,150,000	Sub Koordinator Kepegawaian	Laporan				1		
4 Peningkatan kompetensi pegawai;											1 Keterlambatan penerbitan Surat	1	20,000,000	Sub Koordinator Kepegawaian	Laporan				1		
Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks skala 100	75				75				1 Kegiatan Koordinasi/Monitoring/Evaluasi Kegiatan Pengawasan dan Manajemen Pengawasan	1 Pemotongan anggaran	3	-	Kabag Umum	Kegiatan					1	
											21	45	28,548,937,000								
											312	565	31,185,165,000								